

# Keadilan Menurut Axel Honneth

Helena E Rea

helenera@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

## Abstrak

Tulisan ini ingin menunjukkan pandangan Axel Honneth tentang keadilan. Berbasis pada teori pengakuan dan kebebasan sosial, Honneth mendorong manusia mencapai moral etis dan nilai keadilan. Hidup bersama yang harmonis mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur dalam teori pengakuan, yakni cinta, hukum, dan solidaritas. Masyarakat berhak membatasi kebebasan seseorang, sejauh tujuannya adalah menjamin hak-hak anggota masyarakat lainnya dan demi kepentingan dan kemajuan bersama. Sayangnya, institusi etis masih dipandang sebagai 'penjara' bagi individu terkait dengan kebebasan. Berbasis pada norma etis dan kebebasan sosial, suatu masyarakat dapat mencapai kondisi keadilan sosial. Masing-masing individu yang berada dalam komunitas etis menyadari motif unik dan intensi dalam mengakomodasi peran dan obligasi sosialnya.

**Keywords:** pengakuan, kebebasan, keadilan sosial, *Sittlichkeit*, moral etis

## Pendahuluan

Basis pandangan Honneth adalah realitas kehidupan masyarakat modern rentan terhadap berbagai ancaman patologis seperti penindasan, dominasi, kekerasan, termasuk penghinaan. Menurut Honneth, kondisi ini terjadi dipicu oleh ketiadaan penghargaan (*disrespect*) sebagai dampak dari absennya pengakuan (*misrecognition*) dalam relasi antarmanusia. Dampaknya adalah manusia hidup berdampingan tapi juga terpenjara dalam ruang-ruang institusi sosial. Teori pengakuan Axel Honneth memungkinkan manusia membangun norma etis melalui relasi intersubjektif sehingga individu mendapatkan kebebasan. Bagi Honneth, kebebasan menemukan ruang aktualisasinya dalam prinsip-prinsip pengakuan. Individu mencapai kebebasan penuh dalam ruang-ruang tatanan sosial-moral (*Sittlichkeit*) yang disepakati bersama sebagai sebuah komunitas etis. "Bagaimana teori pengakuan dan kebebasan sosial Axel Honneth mendorong individu-individu mencapai pedoman moral etis dan keadilan sosial?"

## Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian. Buku utama yang dipergunakan adalah karya Axel Honneth yang berjudul

*Freedom's Right: The Social Foundation of Democratic Life*. (terjemahan Joseph Ganahl, Columbia University Press, New York, 2014). Karya Axel Honneth lain yang dikaji adalah *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. (terjemahan Joel Anderson, The MIT Press Cambridge, Polity Press, Massachusetts, 1995). Dalam kedua buku tersebut, kebebasan sosial dapat dicapai ketika subjek yang hendak mencapai tujuannya belajar untuk merumuskan keinginan dan niatnya pada basis 'universal' di mana mereka membutuhkan orang lain untuk melengkapi upaya mencapai tujuannya. Ketika individu memainkan perannya dalam struktur-struktur sosial dan masuk dalam proses penentuan diri secara resiprokal, Honneth mengusulkan agar individu perlu membangun habitus. Individu terus-menerus membangun interaksi untuk mengenal orang lain, dan melihat dirinya dalam diri orang lain. Membangun habitus individu akan langsung memberikan pengakuan terhadap kehadiran individu yang lain dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhannya.

## Axel Honneth dan Pembaharuan Teori Kritis

Axel Honneth adalah seorang filsuf sosial dan teoretikus kritis yang terkenal dengan karyanya tentang pengakuan dan kebebasan sosial. Honneth lahir pada 18 Juli 1949 di Essen, Jerman. Pada tahun 1969, Honneth memulai studi di Universitas Bonn dan Bochum mempelajari filsafat, sosiologi, dan sastra Jerman. Kehidupan di kampus yang penuh dinamika mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan sosial dan politik di Jerman pada waktu itu. Ia melibatkan diri dalam gerakan mahasiswa dan partai politik progresif, juga ikut terjun dalam pergolakan budaya dan politik di tahun 1960-an dan awal 1970-an.<sup>1</sup> Usai memperoleh gelar master dari Universitas Bochum pada 1974, Honneth melanjutkan studi doktoral di Universitas Freie Berlin, yang ia diselesaikan pada 1982.

Pada tahun yang sama, ia memperoleh kesempatan melakukan penelitian di *Max Planck Institute*, sebuah lembaga penelitian terkemuka di bawah kepemimpinan Jurgen Habermas yang kemudian menjadikan Honneth kader. Ia mengikuti gurunya ke Frankfurt ketika Habermas menjadi direktur

<sup>1</sup> Zurn, Christopher F. (2015). *Axel Honneth – Key to Contemporary Thinkers*. Cambridge: Polity Press. h.2.

di Universitas Goethe di Frankfurt, menjadi *Hochschulassistent* (asisten profesor). Setelah merampungkan habilitasi (*Habilitationsschrift*) pada 1990, dan menghasilkan disertasi doctoral keduanya yang berjudul *Kampf um Anerkennung* (*Struggle for Recognition*). Setahun kemudian ia diangkat menjadi asisten profesor bidang filsafat di *University of Konstanz*, lalu dipromosikan sebagai profesor di *University of Berlin*.

Pada tahun 1996, Honneth kembali ke Frankfurt sebagai Profesor di bidang filsafat sosial. Dalam kurun waktu 2001 hingga 2018, Honneth menduduki posisi direktur pada *Institute for Social Research*. Sejak 2011, ia membagi waktu antara Frankfurt dan New York, mengambil posisi sebagai *Professor of the Humanities* pada Departemen Filsafat di Universitas Columbia di New York.<sup>2</sup> Honneth adalah seorang pengajar aktif pada universitas-universitas di dunia seperti di Universitas McGill di Montreal Kanada, Universitas Kyoto di Jepang, *The New School di New York*, Universitas Amsterdam di Belanda, *Boston College* di Amerika Serikat, *Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales* di Paris, *Dartmouth College* di Amerika Serikat, dan *Université de Paris, Sorbonne*. Sebagai seorang intelektual publik, Honneth sangat produktif dan telah menulis buku dan artikel yang berpengaruh di mana ia menganalisis dan memberi tafsiran mendalam dengan pendekatan teori kritis Jerman.<sup>3</sup>

Sejak awal Honneth telah membangun tradisi filosofisnya dalam rumah idealisme Jerman dan Mazhab Frankfurt. Dinamika perkembangan pemikiran selalu dalam dinamika dialektika kritis. Meski besar dalam tradisi ini, secara selektif, Honneth juga mengkritik karya para pemikir besar seperti Hegel, Kant, dan bahkan mentornya sendiri, Habermas. Dalam pengembangan teori kritis, perbedaan pemikiran Honneth dengan para pendahulunya itu terdapat dalam konteks sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

Teori Kritis menurut Honneth memiliki dua elemen mendasar yakni, sebagai pijakan empiris dalam realitas sosial dan sebagai pijakan emansipatoris, yakni sebagai pijakan dasar dalam melakukan perubahan. Premis-premis teorinya dibangun dengan memeriksa kembali patologi-patologi yang mem-

bentuk subjek, lalu menganalisis efek distorsi dari kondisi sosial masyarakat modern yang bersifat subjektif sebagai dasar konflik dan perjuangan sosial. Bangunan teori ini mengandung kritik terhadap kategori-kategori filosofis yang secara erat terkait dengan diagnosis sosial untuk mengidentifikasi hasrat emansipatoris yang sering disembunyikan, tak menampakkan dirinya, ditekan, atau diabaikan. Honneth melanjutkan proyek diagnosis patologi sosial yang sudah dikembangkan oleh pendahulunya dalam tradisi Sekolah Frankfurt. Dari generasi pertama, ia menggunakan pengalaman subjektif terhadap dominasi, alienasi, reifikasi, dan deformasi sebagai pengembangan identitas subjek.

Dengan fokus pada subjektivitas individu, Honneth tidak mengambil analisis Habermas yang rasional-prosedural, filsafat, bahasa, dan dinamika sosial makro. Pendekatan umum dari dua generasi teori kritis yang diadopsinya adalah pendekatan yang berorientasi empiris sebagai sarana untuk mengidentifikasi patologi sosial dalam masyarakat kapitalis modern dan mengembangkan gagasan normatif dalam hubungan intersubjektif dengan manusia lain yang didasarkan pada prinsip pengakuan.<sup>4</sup> Lokus pemikiran Honneth adalah dinamika kekuasaan, pengakuan, dan rasa hormat. Teori sosial kritis yang dikembangkannya bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menyoroti secara kritis semua realitas sosial dengan perhatian khusus pada konflik aktual. Honneth juga mengevaluasi dan menganalisis tatanan sosial yang telah rusak, atau terdistorsi sebagai akibat adanya penyimpangan yang membuat manusia gagal mencapai emansipasi, yakni cita-cita kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.

### Bermula dari Kondisi Patologis

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, potensi kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk-bentuk patologi sosial sangat tinggi. Hal ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari di mana bentuk patologi sosial yang seringkali terjadi seperti diskriminasi kelompok agama tertentu atau kekerasan berbasis gender yang utamanya berdampak pada kelompok perempuan, krisis identitas yang dialami oleh kelompok masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga terjadi kriminalitas terkait kelompok-kelompok yang marginal secara ekonomi, atau praktik korupsi yang semakin memperparah jurang ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Pembiaran terhadap kondisi patologi menghasilkan ketimpangan, ketidakadilan, dom-

<sup>2</sup> Zurn, 3. (*Kampf um Anerkennung* merupakan karya Honneth dalam bahasa Jerman, diterbitkan pada tahun 1992. Karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Struggle for Recognition* yang terbit pada tahun 1995. Karya ini menarik perhatian dunia tentang paradigma baru dalam teori sosial kritis, terutama dengan tiga paradigma teori pengakuan).

<sup>3</sup> Zurn, 4

<sup>4</sup> Petherbridge, Daniel (2013). *The Critical Theory of Axel Honneth*. Maryland: Lexington Books. h. 3.

inasi, dan kegagalan dalam bangunan relasi sosial masyarakat. Pembiaran juga akan menghilangkan penghargaan terhadap keberadaan individu atau kelompok tertentu. Kondisi ini dapat dengan mudah berkembang luas sehingga tatanan sosial dalam masyarakat menjadi pincang.

Menurut pendekatan psikoanalitik, kondisi patologis dalam masyarakat tidak terjadi begitu saja. Psikoanalisis Freud menunjukkan bahwa akar kemunculan patologi sosial yang berkembang dalam masyarakat adalah gangguan psikis dan naluri pada subjek (kondisi neurosis). Dari sisi subjektif, penyakit sosial berkaitan dengan persoalan identitas individu, identitas religi, dan pilihan-pilihan privat seperti selera, orientasi seksual, pekerjaan, atau sekadar pilihan rekreatif. Persoalan psikis yang dialami individu berdampak pada ketidakstabilan relasi sosialnya dengan individu lain.<sup>5</sup>

Kondisi patologis yang semula hanyalah gangguan neurosis, dapat dengan mudah menghasilkan distorsi dalam komunikasi antar-subjek. Apabila dibiarkan, kegagalan subjek membangun relasi sosial akan berdampak pada rusaknya tatanan sosial. Kondisi ini akan semakin meluas dalam masyarakat karena adanya tekanan politik, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Meluasnya kontradiksi dalam masyarakat menjadi patologi kolektif yang oleh Freud disebut sebagai neurosis kolektif.<sup>6</sup> Neurosis kolektif menghasilkan sikap apatis dan ketidakpedulian individu yang satu terhadap orang lain.

Honneth menerapkan teori psikoanalitik Freud, melakukan diagnosa terhadap kondisi patologis dalam masyarakat dan menawarkan penyelesaian dengan pendekatan moral etis. Baginya, persoalan patologi sosial ini merupakan persoalan integral dalam kehidupan praksis dan etis pada diri individu. Proses diagnosis diaktualisasikan dengan melakukan penjelajahan historis sejak dari Plato, pada jaman Yunani Kuno hingga ke Arendt, masa kontemporer. Dalam rentan masa ini, Honneth melihat bahwa hal linear yang menjadi dasar persoalan patologis dalam masyarakat letaknya pada penghargaan terhadap kebebasan subyek. Kebebasan adalah hal penting dalam melihat kemanusiaan manusia. Persoalan kebebasan dalam relasi intersub-

jektif berkontribusi dalam menentukan diri subjek dan relasi sosialnya dengan yang lain.

Bagi Honneth sendiri, perkembangan patologi sosial terlihat sejak individu membangun identitas sosialnya dalam masyarakat. Dalam proses ini muncul kepalsuan dalam upaya merealisasikan diri dan mengembangkan standar-standar normatif dalam masyarakat. Standar-standar normatif yang sudah berkembang ini memberikan landasan pada prinsip-prinsip etis yang mendasar pada subjek. Fondasi normatif yang berkembang tanpa pijakan dalam institusi sosial hanya menghasilkan kondisi yang tidak seimbang, karena yang muncul justru determinasi-determinasi subjektif dan sosial pada individu. Honneth menyebut kondisi ini sebagai penyakit (patologi) sosial. Dampak terhadap individu yang berada dalam kondisi patologis yang kolektif adalah munculnya batasan-batasan pada kebebasan sosial, terutama adanya hambatan dalam membangun relasi-relasi sosial antar-individu dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Persepsi ini menjadi pendasaran bagi teori kritis Honneth untuk mendiagnosis gangguan yang ada dalam masyarakat. Teori kritis—melalui kekuatan kritis metode dialektika—menelaah pertentangan atau kontradiksi dalam masyarakat dan kenyataan sosialnya untuk mencapai masyarakat yang emansipatoris.<sup>8</sup> Kondisi patologis yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat dari tidak adanya pengakuan dari satu subjek kepada subjek yang lain. Ketiadaan pengakuan mengakibatkan kegagalan individu mengaktualisasi dirinya. Subjek yang gagal mengaktualisasi diri adalah subjek yang terperangkap dalam batasan-batasan. Situasi itu bermula pada ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Tidak adanya saling-pengakuan (*mis-recognition*) membelenggu individu dan menjadikannya tidak bebas. Sementara kebebasan adalah hasrat mendasar dalam diri setiap orang yang terus-menerus ia perjuangkan. Bagi Honneth pemulihan patologi sosial bermula dari pemulihan kondisi psikologis subjek lalu berkembang ke penyelesaian kolektif dalam ruang-ruang institusi sosial merupakan upaya penyelesaian yang sistematis. Pengakuan adalah kunci yang memungkinkan dapat dibukanya pintu relasi timbal balik yang harmonis antar-subjek dan memungkinkan jalan terbuka transformasi patologis sosial.

### Melampaui Tindakan Komunikatif Habermas

Relasi antara Honneth dan Habermas adalah relasi intelektual, relasi guru dan murid. Pemikiran

<sup>5</sup> Hardiman, F Budi (1990). Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. h. 52.

<sup>6</sup> Honneth, Axel (2014). The Diseases of Society: Approaching a Nearly Impossible Concept. The Johns Hopkins University Press: Journal Article Social Research Vol. 81 No 3, German Perspectives on the Social Sciences. h. 683-703.

<sup>7</sup> Zurn, 94, 95.

<sup>8</sup> Hardiman, 53.

Habermas merupakan salah satu basis dalam mengembangkan teori pengakuan. Melalui teori komunikatif masyarakat merupakan teori kritis yang diutarakan Habermas mengatasi kebuntuan gagasan dari generasi pertama teori kritis menghadapi persoalan dalam masyarakat. Teori tindakan komunikatif memberikan fokus pada rasio. Melalui tindakan komunikatif, individu didorong melakukan proses reflektif dalam dialog yang argumentatif, bersifat rasional. Hubungan komunikasi memberikan dampak terhadap pelepasan dalam relasi produksi tuan-budak, dan membangun relasi bersama.

Menurut Habermas setiap tindakan bertutur akan memvalidasi empat gagasan. Pertama, validitas atas kebenaran sebagai hasil dari tindakan tutur teleologis. Kedua, validitas atas kebenaran moral sebagai hasil dari tindakan tutur normatif. Ketiga, validitas ketulusan. Keempat, realisasi diri mencapai pembebasannya dari segala bentuk penindasan dan ideologi dogmatis.<sup>9</sup> Dalam tindakan komunikatif ada hubungan intersubjektif yang memungkinkan terjadinya kontrol diri yang rasional dan mewakili inti dari kebebasan yang sesungguhnya. Melalui jalan komunikatif, Habermas menemukan arah kemajuan manusia untuk sampai pada tujuan emansipatoris. Namun, justru dengan berpusat pada wacana dan rasionalitas, teori kritis Habermas terjebak dalam positivisme yang semula hendak dikritiknya.

Persamaan Habermas dan Honneth adalah, bahwa keduanya berpusat pada hubungan intersubjektivitas dalam interaksi sosial sebagai basis referensi kritis terhadap sifat imanen dan transenden manusia. Keduanya memandang bahwa manusia sampai pada titik memahami dirinya hanya dan melalui interaksi sosial dengan yang lain. Relasi hubungan manusia menurut Honneth berada dalam relasi-relasi antar masyarakat (relasi historis dan antropologis), sementara Habermas bertitik tolak pada bahasa (linguistik) sebagai pendekatan *praxis*.

Kritik Honneth terhadap Habermas bahwa paradigma komunikatif mereduksi relasi imanen dan transenden manusia. Jalan keluar yang ditawarkan Habermas dipandang Honneth mengabaikan peran norma dalam masyarakat. Menurut Honneth, kemajuan emansipatoris melampaui tindakan komunikatif yang berbasis rasio semata. Rasionalisme dalam relasi sosial terkadang tidak menguntungkan karena memagari proses emansipasi. Masyarakat yang emansipatoris tersembunyi dalam struktur-struktur interaksi sosial. Dalam ruang inilah kondisi

patologis menunjukkan keberadaannya. Interaksi sosial yang patologis membuat orang mengalami keterhinaan, tidak dihargai, dan diperlakukan tidak adil. Bahasa semata belum membuka tabir moralitas, melainkan masih tersembunyi, sebab beban produksi dan penghargaan sosial masih menyisakan kelas dalam masyarakat. Perjuangan kelas justru mencoba mengungkap moralitas tersembunyi yang hadir dalam pengalaman ketidakadilan dari kelompok-kelompok yang didominasi. Bagi Honneth, persoalan kelas ini adalah menjadi hambatan dalam bangunan relasi sosial yang emansipatif. Perjuangan kelas dalam masyarakat bukan persoalan empiris semata, tetapi juga konseptual. Penyelesaian dalam membangun ketimpangan ini dengan cara yang kontekstual.<sup>10</sup>

Dalam diiskusikan kebebasan Honneth melihat peran penting institusi sosial, yang tak mengambil peran pendukung kebebasan semata, tetapi sebagai medium. Melalui ini, subjek dapat melakukan tindakan reflektif yang dipandang perlu untuk determinasi diri, yang terjadi karena adanya interaksi sosial dengan subjek lain yang melakukan tindakan yang sama. Tindakan ini disebut sebagai tindakan resiprokal. Padanya landasan kebebasan subjek bersandar. Hubungan timbal balik merupakan jalan bagi masing-masing individu mencapai bebas dan mampu merealisasikan dirinya.<sup>11</sup>

### Teori Pengakuan dan Arah Kebebasan Sosial

Honneth mengembangkan teori analisis sosial pada jantung subjek dan relasinya dengan subjek lain dalam institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat. Ia menekankan pentingnya kematangan psikologis (emosi) pada subjek sebagai fondasi relasi etis dalam suatu komunitas untuk membangun tatanan sosial yang adil. Dengan memahami subjek maka sumber-sumber patologis dapat dipetakan dan ditemukan jalan keluarnya. Relasi subjek dengan yang lain tak berada dalam ruang hampa. Ia terbangun dalam institusi-institusi sosial yang berperan memastikan agar individu dapat membangun relasi timbal balik dengan yang lain. Teori Kritis Honneth tidak hanya berfokus kekuasaan dan dominasi, tetapi lebih dalam menuju fenomenologi. Ia berada pada level hubungan mikro dalam relasi sosial.

Honneth menawarkan paradigma pengakuan sebagai jalan perubahan. Teori tindakan komunikatif berada dalam dimensi interaksi. Teori pengakuan mengantar pada interaksi intersubjektif. Subjek tidak hanya membangun interaksi semata, tetapi lebih dari itu, interaksi yang melibatkan tindakan

<sup>9</sup> Deranty, Jean-Philippe (2009). *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy*. Leiden: Brill. h. 108-109.

<sup>10</sup> Deranty, 108-109.

<sup>11</sup> Zurn, 17.

reflektif. Dengan adanya pengakuan, proses perubahan sosial didasarkan pada tindakan hubungan etis normatif dalam konteks hubungan imanen yang muncul dari dalam diri, tindakan reflektif juga yang harus keluar dari dirinya. Dengan kesadaran ini, masyarakat memiliki kekuatan melawan cengkraman patologi sosial dan mempromosikan humanisme dan komunitas yang rasional.

Teori pengakuan menjelaskan pengalaman-pengalaman empiris. Dalam pengakuan ada tiga unsur kunci yakni cinta, hormat, dan solidaritas. Honneth menawarkan teori ini untuk menginvestigasi akar persoalan sosial dalam jaringan relasi intersubjektif yang mengalami distorsi. Hasilnya adalah analisis relasi antarsubjek, juga didalamnya termuat uraian deskriptif unsur-unsur patologis. Hubungan yang tidak terdistorsi dalam diri subjek bergantung pada tiga bentuk pengakuan yang diperolehnya dari subjek lain.<sup>12</sup>

Bagi Honneth, pengakuan dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Realitas pengakuannya memiliki tiga peran besar yakni, *pertama*, pengakuan memberikan petunjuk bagaimana manusia memainkan perannya sebagai individu dalam suatu tatanan moral masyarakat. *Kedua*, pengakuan memberikan arah bagaimana menjalankan peran sebagai anggota dalam sebuah sistem produksi bersama, dan sebagai warga negara dalam sebuah sistem tata negara demokratis. *Ketiga*, pengakuan memberikan pondasi akan kebutuhan interpersonal, bagian dari dinamika komunikasi itu sendiri.

Pengakuan merupakan proses rekonsiliasi dengan membangun komunikasi yang tiada henti untuk penentuan diri, keterikatannya dengan yang lain, individualisme, dan solidaritas. Pengakuan merupakan sebuah proses formasi identitas individu yang sepenuhnya bergantung pada afirmasi diri yang diperoleh dari individu lain. Relasi pengakuan memberikan kebebasan bagi individu, yang merupakan syarat utama bagi subjek untuk dapat merealisasikan dirinya dan kehendaknya. Jalan untuk mencapai telos, yakni keadilan sosial yang dimaksudkan Honneth diuraikan dalam alur historis empiris dengan pengakuan dalam ruang-ruang kebebasan sosial.

### Dari Kebebasan Sosial Menuju Keadilan Sosial

Pandangan tentang kebebasan diuraikan Honneth dalam karyanya yang berjudul *Freedom's Right*

<sup>12</sup> Honneth, Axel (1995). *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. terj. Joel Anderson. The MIT Press Cambridge, Massachusetts: Polity Press. h. 2.

menempatkan perspektif Berlin mengurai arti kebebasan. Dalam pandangan Berlin, kebebasan dilihat dalam dua konsep yakni bebas *dari* (*kebebasan negatif*) dan bebas *untuk* (*kebebasan positif*).<sup>13</sup> Dengan dua konsep kebebasan ini, Berlin hendak memprovokasi perdebatan, diskusi, dan pembentukan gagasan tentang kebebasan dari para pemuja maupun pengkritiknya. Honneth mengurai analisis historis pemaknaan kebebasan negatif dan kebebasan positif serta kritiknya.

### Kebebasan Negatif: Kebebasan Individu dan Perlindungan Hukum

Paham kebebasan negatif berarti paham yang menunjukkan *tidak* adanya kekangan (*bebas dari*). Sebuah moral modernitas di mana individu menyampaikan tuntutan akan haknya bertindak sesuai dengan preferensinya sendiri, tanpa batasan eksternal dan tanpa harus menyerahkan motif mereka pada penilaian rasional, asalkan mereka tidak melanggar hak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Prinsip kebebasan negatif adalah individu harus menjadi tuan atas dirinya.

Paradigma kebebasan ini sudah terlebih dahulu disampaikan dalam diskursus teori politik mulai dari Thomas Hobbes pada Abad Modern hingga Robert Nozick dalam wilayah pemikiran politik kontemporer.<sup>14</sup> Dalam menjelaskan paradigma kebebasan negatif, Honneth memulainya dengan teori kontrak sosial Hobbes. Pandangan ini berkembang karena perjalanan sejarah yang ditandai dengan kecenderungan absolutis kekuasaan raja/negara. Kebebasan negatif mengutamakan kondisi individu tidak dicegah atau dilarang untuk memenuhi keinginannya.<sup>15</sup> Ia tidak mendapatkan hambatan, baik dari negara atau dari warga lain.

Gagasan Hobbes akan kebebasan tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga pada 'kehendak'. Baginya, subjek memiliki hak mutlak terhadap kehendaknya dan segala daya upaya untuk mencapainya.<sup>16</sup> Penumpukan kekuasaan hanya pada individu atau kelompok tertentu saja. Apa yang terjadi seandainya individu tidak memiliki kebebasan dan ia dihalang-halangi untuk melakukan hal yang diinginkannya? Hal yang kemudian terjadi adalah

<sup>13</sup> Margalit, Avishai (2013). Foreword: The Philosopher of Sensibility. dalam Isaiah Berlin ed. Henry Hardy, *The Power of Ideas* (edisi kedua). New Jersey: Princeton University Press. h. xvi.

<sup>14</sup> Herry-Priyono (2020). Makalah Politik dan Filsafat Politik. Jakarta: Driyarkara, h. 18.

<sup>15</sup> Zurn, 159.

<sup>16</sup> Honneth, Axel (2014). *Freedom's Right: The Social Foundation of Democratic Life*. terj. Joseph Ganahl. New York: Columbia University Press, h. 22.

muncul bentuk-bentuk penindasan. Dalam pandangan Hobbes, situasi ini disebut sebagai kondisi alami, yang oleh Honneth disebut sebagai kondisi patologis. Dalam kontrak sosial yang ditawarkan Hobbes adalah kesempatan bagi setiap individu untuk memiliki keleluasaan untuk bertindak tanpa ada rasa takut akan adanya ancaman dari luar dirinya.

Tekanan yang diberikan oleh Hobbes adalah bahwa setiap subjek bebas menentukan dirinya yang dilandasi oleh keinginan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Individualisme menjadi prinsip penggerak utama dalam membentuk otonomi diri dan keinginan untuk merealisasikan diri. Teori Hobbes berkembang dan mencapai puncaknya ketika individualisme menjadi prinsip masyarakat modern pada abad ke-20. Teori Hobbes ini kemudian dipandang sebagai ekspresi kecenderungan manusia untuk egoistik, narsistik, dan berpusat pada diri.

Pandangan akan otonomi diri ini dipertegas oleh Sartre dengan gagasan eksistensialisme. Sartre melihat kebebasan diri sebagai bentuk eksistensi diri. Gagasan Sartre dikenal sebagai imperatif eksistensial, sementara Hobbes menyebutnya sebagai fakta normatif.<sup>17</sup> Hobbes dan Sartre mengamati bahwa kebebasan negatif ini telah menjadi konsep dunia modern, karena kebebasan mengafirmasi perjuangan individu. Sebuah tindakan disebut bebas jika berkontribusi pada bentuk ekspresi pilihan individu.<sup>18</sup>

Sartre menegaskan pandangannya bahwa kebebasan harus lepas dari segala keharusan dan ikatan. Sebagaimana yang disampaikan Sartre 'eksistensi mendahului esensi'. Eksistensi yang dimaksudkan Sartre adalah kebebasan. Manusia men-'jadi' (esensi), ditentukan oleh dirinya sendiri (eksistensi). Konsep eksistensial Sartre yakni *pour-soi*, yaitu kesadaran dan kebebasan. Ini berarti bahwa kebebasan bersifat mutlak. Kebebasan berkontribusi dalam membentuk manusia menjadi otentik dalam menentukan apa dan siapa dirinya.<sup>19</sup> Kebebasan eksistensial tidak bisa dibatasi oleh apapun, baik itu batasan fisik atau batasan kemauan pihak lain. Kedua batasan ini adalah 'ekspresi' dari pilihan yang telah dibuat manusia tentang kemungkinan keberadaannya.

Memahami kebebasan negatif dari sisi eksistensi adalah ide tentang kebebasan individu untuk mencapai keinginan-keinginannya, untuk memilih

bentuk kehidupan yang dikehendaki tanpa adanya hambatan-hambatan eksternal, tak juga dibatasi oleh kehendak yang lemah. Dalam pilihan-pilihan eksistensi, tidak ada ketentuan bahwa kita harus menjustifikasi diri kita, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain.

Dalam pandangan Honneth, Sartre telah meradikalisasi konsep Hobbes tentang kebebasan. Dalam pathos eksistensial, hanya hambatan dari luar terhadap kebebasan yang dianggap penghalang tindakan manusia. Tak perlu ada langkah reflektif tambahan, karena justifikasi terhadap tujuan-tujuan tersebut bukan merupakan bagian dari kebebasan.

Lebih lanjut Honneth memotret kebebasan pada era pemikiran politik kontemporer. Honneth melihat bahwa pandangan kebebasan menurut Robert Nozick (1938-2002) merupakan kontribusi penting dalam melihat perkembangan historis nilai kebebasan. Nozick mengembangkan konsep kebebasan negatif melalui gagasan libertarianisme. Konsep ini menjunjung tinggi kebebasan sebagai nilai inti. Kaum libertarian berusaha memaksimalkan otonomi dan kebebasan politik, serta meminimalisasi peran negara terhadap individu. Nozick menempatkan konsep kebebasan berbasis pada pandangan Hobbes dan Locke<sup>20</sup> yang mendasarkan teorinya pada tatanan politik yang adil. Ia menyadari bahwa kebebasan individu merupakan kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan niat diri tanpa ada hambatan eksternal, memiliki perspektif yang individualistik, bahwa kebebasan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang egoistik dan fokus

20 Snijders, 122-123: John Locke (1632-1704) adalah filsuf Inggris yang juga dikenal sebagai Bapak Liberalisme. Praktik kekuasaan yang absolut dan kesewenang-wenangan ini kemudian menginisiatif pemikir abad modern untuk meredam model sistem kekuasaan tersebut. John Locke berpandangan bahwa manusia berada dalam kebebasan, bukan kebebasan sebagaimana digambarkan Hobbes, melainkan sebuah keadaan alami (the state of nature). Manusia lahir dalam kondisi kebebasan sempurna (perfect freedom). Manusia memiliki kebebasan penuh untuk melakukan hasrat dan kehendaknya. Menurut Locke, batas-batas kebebasan sudah diatur dalam hukum alam. Tidak seorangpun boleh merusak kehidupan orang lain, tidak juga membatasi kebebasan. Hukum alam telah mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, bukan dirinya yang diatur bagaimana harus bersikap. Dalam pandangan Locke, negara menyempurnakan kondisi alami manusia di mana manusia memiliki hak-hak alami (natural right) atas hidup, kebebasan, dan atas kepemilikan. Setiap orang memiliki kesadaran dan kebebasan sebagai bagian dari sebuah masyarakat politik. Demikian gagasan Locke bahwa kekuasaan perlu dibatasi. Manusia hanya dibatasi oleh hukum alam.

21 Honneth, Freedom's Right, 24.

17 Honneth, Freedom's Right, 23.

18 Honneth, Freedom's Right, 23.

19 Snijders, Adelbert (2004). Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. h. 120-121.

pada diri sendiri.<sup>21</sup> Konteks sosial politik Nozick hendak menunjukkan bahwa tujuan pengembangan gagasan kebebasan ialah untuk menjamin adanya ruang untuk tindakan-tindakan yang egosentris dan tidak dihalangi oleh beban tanggung jawab terhadap yang lain. Menurut Nozick, negara harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu.

Nozick berpendapat bahwa semua tujuan hidup, sekalipun meniadakan tanggung jawab, merusak diri, merugikan diri sendiri, tetaplah kebebasan yang harus dilihat secara objektif sebagai bagian dari realisasi hak individu itu sendiri. Prinsipnya adalah kebebasan individu tetap terlaksana dengan tidak melanggar hak orang lain. Dalam pandangan Honneth, Nozick mendemonstrasikan konsep kebebasan negatif yang telah dikembangkan oleh Hobbes dengan lebih radikal.

Kebebasan yang diuraikan oleh ketiga pemikir tersebut tampak memberikan individu legitimasi untuk mencapai keinginan diri tanpa ada hambatan. Alih-alih melihatnya sebagai bentuk kebebasan penuh, Honneth justru berpandangan sebaliknya, bahwa kebebasan negatif memiliki batasan rasional terhadap kebebasan individu karena eksistensi individu akan bersinggungan dengan eksistensi individu yang lain dan kebebasan seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya hanya bisa dinilai ketika berdamai dengan tujuan hidup orang.<sup>22</sup>

Namun, bagi Honneth, konsep kebebasan negatif ini tampak terlalu sempit untuk menggambarkan kepentingan masyarakat karena hanya dilihat sebagai alat untuk melindungi ruang kebebasan bertindak bagi individu dan terpusat pada diri (*egocentric*), tanpa perlu ada tanggung jawab terhadap yang lain.<sup>23</sup> Konsep kebebasan negatif dalam pandangan Hobbes, Sartre, ataupun Nozick dalam konteks masyarakat modern abad XX tampak hanya menghasilkan masyarakat individualistik dan cenderung bersifat narsistik dan eksentrik. Tujuan masyarakat yang ideal, sebagai masyarakat modern yang etis akan sulit dicapai.

Pada akhirnya, moralitas hanya akan efektif jika dipahami sebagai cara manusia memberikan batasan pada dirinya sendiri. Kebebasan mengandung elemen reflektif sejak dari awal. Honneth berpandangan bahwa, tidak ada kebebasan yang saling mendahului. Kebebasan negatif dan reflektif sifatnya paralel. Kebebasan negatif memiliki elemen originalitas diri, di mana ada pemahaman diri terkait

moral modernitas bahwa individu berhak atas dirinya dan bertingkah sesuai dengan preferensinya tanpa ada restriksi atau batasan. Kebebasan juga tak harus menjelaskan motifnya. Cukup dengan pertimbangan rasional selama individu tersebut tak melanggar hak sipil individu yang lain untuk melakukan hal yang sama.

### Kebebasan Reflektif: Otonomi Diri dan Batasan Moral

Honneth memberi fokus pada relasi subjek dengan dirinya sendiri dalam memaknai kebebasan reflektif. Honneth memberikan ulasannya tentang arti kebebasan reflektif yakni kondisi di mana individu bebas jika tindakan mereka sepenuhnya ditentukan oleh intensi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Bagi Honneth, individu memiliki proses pemaknaan reflektif, di mana individu mampu menentukan tindakannya yang terarah kepada gagasan tentang otonomi dan realisasi diri.<sup>24</sup>

Kebebasan reflektif merupakan gagasan kebebasan yang diarahkan pada internal diri subjek dan berfokus pada hubungan subjek dengan dirinya sendiri. Kebebasan reflektif atau kebebasan positif dipahami sebagai kebebasan untuk melakukan sesuatu (*freedom to*). Ia memiliki otonomi pada dirinya untuk merealisasikan kehendak serta menjalankan pilihan-pilihan dalam hidupnya sejauh ada alasan-alasan reflektif. Tindakan individu didasari pada niat yang telah melewati proses pertimbangan yang mendalam. Seseorang dinilai bebas ketika ia mampu menunjukkan bahwa tindakannya telah berkembang dalam dua arah, yakni gagasan 'otonomi' dan 'realisasi diri'.

Bagaimana kebebasan reflektif ini berkembang? Menurut Honneth, kebebasan reflektif sudah ada sejak dari Aristoteles yang berpendapat bahwa syarat bagi individu yang bebas ketika subjek tersebut sampai pada keputusan sendiri dan memiliki kehendak sendiri.<sup>25</sup> Dengan penilaian historis ini pula, Honneth menunjukkan bahwa setiap kemunculan kehendak untuk bertindak yang merupakan realisasi dari kebebasan negatif, pada saat yang bersamaan juga seseorang melakukan tindakan reflektif. Kebebasan eksternal bukan awal dari adanya kebebasan internal, keduanya berjalan seiring dalam diri individu.

Uraian tentang kebebasan reflektif dimulai Honneth dengan mengangkat pandangan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) adalah seorang filsuf abad pencerahan yang berasal dari Jenewa, Swiss. Dalam

<sup>22</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 24.

<sup>23</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 23.

<sup>24</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 30.

<sup>25</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 29.

*The Social Contract* (1762), Rousseau menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya tidak bebas selama ia masih sepenuhnya didorong oleh hasrat semata. Manusia dikatakan bebas jika mempraktikkan sikap patuh pada aturan yang ditetapkan oleh diri sendiri. Dengan dorongan peningkatan diri, manusia sampai pada tahap mampu menentukan nilai etisnya.<sup>26</sup> Tetapi hasrat tidak akan hilang dalam diri manusia. Kodrat manusia selalu berada dalam ambivalensi antara 'hasrat' dan 'nilai etis'. Rousseau dilihat sebagai advokat untuk integritas pribadi.

Menurut Rousseau, seseorang hanya benar-benar bebas jika ia sudah sampai pada proses mengenal dirinya lalu mampu mengartikulasikan kehendak otentik yang muncul dari proses reflektif yang mendalam. Pada subjek yang otonom, moral tumbuh melalui kesadaran dan mengandalkan kemampuan dari dalam dirinya. Berbeda dengan subjek yang heteronom di mana ia merasa ada keterpaksaan dalam bertindak. Yang 'terasa' adalah tindakan akan kehendak bebas hadir dalam berbagai cara dan sudah diatur oleh kesadaran untuk melakukannya.

Honneth menyimpulkan bahwa gagasan kebebasan menurut Rousseau merupakan hasil dari otonomi moral. Hal ini mengadaikan bahwa subjek bebas jika dan karena memiliki kapasitas mengatur dirinya sendiri (*self-legislate*) dan bertindak berdasarkan hukum yang telah ditetapkannya sendiri (*self-imposed law*). Dalam pandangan Honneth, kedua gagasan (hasrat dan kehendak) yang terjadi pada saat bersamaan secara kontradiktif dalam diri individu disebabkan karena individu itu sendiri hanya bisa patuh pada kehendaknya saja atau pada hasrat. Dengan adanya pertimbangan tentang otonomi diri atau pengaturan-diri (*self-legislation*) dan tindakan yang bebas (*free action*) menjadi fondasi dalam gagasan modern tentang kebebasan reflektif dan sebagai jalan tengah mengatasi kontradiksi dalam diri manusia.<sup>27</sup>

Cara pandang Rousseau kemudian berkembang dalam gagasan Immanuel Kant (1724-1804) dan Herder yang memahami otonomi sebagai alasan praktis akan pengaturan diri (*self-legislation*) atau bentuk artikulasi akan harapan individu. Argumen Kant berbasis pada prinsip universal sebagai pegangan bagi individu dalam menentukan kebebasannya. Prinsip universal memungkinkan individu melihat tujuannya tidak semata-mata menjadi tujuan pada dirinya tetapi juga termasuk tujuan bagi yang lain.<sup>28</sup> Namun, dalam masyarakat sosial modern, gagasan menjadi otentik dan memiliki kesadaran diri cenderung menjadikan individu teralienasi dari yang

lain. Dengan demikian kebebasan reflektif ini masih memiliki batasan.

Sumbangan Kant bagi konsep kebebasan manusia melalui ajaran etika yang didasarkan pada unsur a-priori. Hukum moral Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) memuat klaim terkenal, "satu-satunya hal yang baik terkecuali sebelum melakukan sesuatu adalah 'niat baik' (*good will*)". Dalam pernyataan ini, Kant memperkenalkan sikap moral berdasarkan pada suara hati. Kant menyebutnya sebagai otonomi. Uraian tentang moralitas Kant tersebut, berbunyi, "hukum moral berlaku pada setiap makhluk yang rasional, namun kesesuaian tindakan tersebut berlaku seperti pada hukum universal".<sup>29</sup> Kant percaya bahwa hukum yang diatur oleh subjek itu sendiri akan membawa kebebasan, jika, dan hanya jika berbasis pada wawasan yang benar, yang datangnya dari pandangan-pandangan yang rasional. Formulasi gagasan Kant tersebut dikenal dengan imperatif kategoris.<sup>30</sup>

Imperatif Kategoris adalah prinsip universalitas Kant yang mengandung penghargaan akan perilaku yang berlaku universal, "bertindaklah sedemikian rupa sehingga maksim Tindakan yang Anda inginkan sendiri dapat menjadi sebuah hukum universal."<sup>31</sup> Dengan demikian, ia membangun sebuah kriteria universal, di mana subjek kemudian patuh pada prinsip yang juga dipatuhi oleh orang lain, dan prinsip ini tak lain adalah prinsip yang universal.<sup>32</sup> Imperatif kategoris bukan kewajiban normatif sebagai aturan yang disepakati bersama, namun, ia sangat mempengaruhi pandangan Kant tentang kebebasan, dengan argumen bahwa kebebasan adalah kapasitas yang dianugerahkan dan memberikan kegunaan tak terbatas pada semua orang.<sup>33</sup> Untuk memahami nilai kebebasan, subjek harus merealisasikan kebebasannya dengan sebuah syarat khusus, yakni bahwa kebebasan yang digunakan seseorang haruslah konsisten dengan kebebasan yang dipraktikkan oleh orang lain.

Kebebasan reflektif menurut Kant merupakan kewajiban moral. Setiap orang memperlakukan orang lain sebagai entitas yang otonom, sebagaimana hal-

26 Honneth, *Freedom's Right*, 30.

27 Honneth, *Freedom's Right*, 31.

28 Honneth, *Freedom's Right*, 30.

29 Guyer, Paul (2006). *Kant*. New York: Routledge. h. 177-178.

30 Perbedaan antara perintah dan imperatif adalah perintah datangnya dari luar dan imperatif datangnya dari dalam diri subjek itu sendiri.

31 Guyer, 177.

32 Honneth, *Freedom's Right*, 32: "... actions to universal law as such, and this alone must serve the will as its principle. That is to say, I ought never to act except in such a way that I can also will that my maxim should become a universal law."

33 Guyer, 178

nya kita ingin juga diperlakukan demikian. Tindakan reflektif yang diperlukan untuk melaksanakan kebebasan individu digambarkan sebagai hasil dari proses sosialisasi di mana semua subjek belajar untuk menganggap dirinya sebagai salah satu dari pembuat hukum moral yang sah. Interpretasi moral Kant tampak memudar dalam kehidupan sehari-hari dan tereduksi ke dalam gagasan psikologi moral. Individu kemudian memahami bahwa mereka adalah juga aktor yang memiliki tanggung jawab moral. Tindakan otonomi transendensi Kant beralih menjadi analisa moral. Konsep moral Kant mendapatkan makna intersubjektif ketika masuk dalam komunitas komunikatif.

Honneth melihat bahwa pandangan kebebasan reflektif ini menghasilkan otonomi ketika disosialisasikan ke dalam komunitas komunikatif di mana subjek belajar untuk menganggap dirinya sebagai penerima norma-norma universal yang merupakan hasil kerjasama dengan individu lain. Melalui tindakan komunikatif, individu melihat dirinya sendiri sebagai anggota dalam ruang diskursus di mana setiap orang harus menghargai orang lain sebagai subjek yang otonom. Proses komunikasi relasi intersubjektif, "diri" ('I), sebagai subjek yang otonom, dan "kita" ('We'), sebagai subjek-subjek dalam komunitas komunikatif dapat mencapai determinasi diri (*self-determination*) dalam institusi-institusi sosial yang menawarkan kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Salah satu pemikir lain yang juga dipandang Honneth memberikan penajaman dalam memahami kebebasan reflektif adalah Johann Gottfried Herder (1744-1803), seorang filsuf Jerman yang besar dalam tradisi Kantian. Gagasan moral Herder juga dipengaruhi filsafat moral Kant. Herder adalah salah seorang filsuf yang pandangan moralnya berbasis pada otonomi subjek.

Kebaikan individu adalah akar filsafat moral Herder.<sup>34</sup> Individu mencapai kesempurnaan hanya setelah melewati proses refleksi kekuatan diri. Herder percaya bahwa individu memiliki kekhasannya yang memerlukan perawatan layak untuk tumbuh, berkembang, dan menunjukkan potensinya. Perawatan ini adalah proses reflektif pada

<sup>34</sup> Prinsip moral Rousseau, bahwa dalam pada diri subjek, keputusan moral sungguh hanya bersandar pada tindakan reflektif pada diri subjek sendiri. Untuk sampai pada 'perasaan' kepedulian pada orang lain, subjek mendeterminasi dirinya untuk mencegah kekuatan yang merusak yang muncul dari dalam dirinya (hal. 58).

<sup>35</sup> Catatan terjemahan: menjangkau mata dan kaki dalam konteks pernyataan Herder ini dalam pemahaman penulis diartikan bahwa individu telah sampai pada kesempurnaan pemahaman akan dirinya.

diri sendiri. Dalam refleksinya, Herder menulis, "Semakin dalam seseorang memahami dirinya dalam struktur dan dasar pikiran terbaiknya, maka semakin ia menjangkau mata dan kakinya,<sup>35</sup> dan berkata, "Sebagaimana adanya saya, maka itulah saya." Kebebasan reflektif menurut Herder ada dalam tindakan akuisisi yakni dengan mempelajari hukum umum bahasa sebagai kunci tindakan moral, karena dengan bahasa manusia mampu mengartikulasikan kepribadiannya yang otentik.

Tindakan reflektif yang kita pikirkan ketika berbicara tentang kebebasan individu dipahami sebagai proses diakronis untuk penemuan diri sehingga perlu memberikan perhatian utama pada bahasa yang digunakan. Menurut Kant dan Herder, kebebasan merupakan bentuk rasionalisasi pembatasan diri (*self-restriction*). Gagasan kebebasan reflektif dalam diskursus filsafat modern selalu berada dalam tegangan antara determinasi diri (*self-determination*) dan realisasi diri (*self-realisation*), juga antara otonomi dan otentisitas. Secara umum bisa dipahami bahwa kebebasan individu adalah rasionalisasi pembatasan-diri (*self-restriction*) atau sebagai proses diakronis penemuan diri (*self-discovery*<sup>36</sup>).

Berbasis pada pandangan ini, kebebasan reflektif yang muncul dalam diskursus filsafat modern hadir dalam dua gagasan. Pertama, otonomi yang merupakan gambaran akan kemampuan penentuan diri (*self-determination*). Kedua, otentisitas, sebagai sebuah gambaran akan realisasi diri (*self-realisation*).<sup>37</sup> Honneth melihat bahwa kebebasan reflektif atau kebebasan moral ini penting bagi individu untuk memperoleh harapan dari lingkungan sekitarnya. Hal yang juga sama pentingnya adalah individu memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan moralitas dan integritasnya.

Honneth melihat bahwa bentuk kebebasan negatif dan kebebasan reflektif, memiliki keterbatasan untuk mencapai kebebasan yang seutuhnya. Seseorang bisa saja bebas dari tekanan eksternal dan bahkan mungkin memiliki kehendak yang otentik dan otonom, tetapi jika individu tersebut ternyata berbeda dan tidak selaras dengan kehidupan sosial di mana ia berada, maka sesungguhnya individu tersebut tidak benar-benar mendapatkan pengalaman bebas. Sementara itu, kebebasan reflektif memberikan ruang bagi individu untuk menjangkau ke dalam dirinya. Tindakan reflektif memungkinkan individu bertin-

<sup>36</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 33: Proses diakronis penemuan diri dimaksudkan sebagai proses menemukan diri dengan menguak kembali kejadian-kejadian pada diri dengan menggunakan pendekatan genealogi. Setiap peristiwa yang terjadi pada diri disusun kembali berdasarkan urutan masa kejadiannya.

<sup>37</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 34.

dak berdasarkan otonomi dan keinginannya sendiri. Tetapi kelemahan dari pandangan kebebasan ini adalah bahwa subjek tidak ke luar dari dirinya dan menjangkau wilayah yang obyektif.

Honneth kemudian menawarkan kebebasan yang berpusar pada nilai moral modernitas yang bergerak dalam institusi sosial-moral di kehidupan masyarakat modern, yang dikutip Honneth dari gagasan Hegel sebagai *Sittlichkeit*, yang melaluinya kehidupan sosial masyarakat modern dibangun dalam kondisi liberal dan demokratis dengan norma. *Sittlichkeit* menjadikan sebuah masyarakat yang rasional mengamankan kondisi-kondisi etis yang dibutuhkan dalam realisasi kebebasan individu. Gagasan konstitutif otonomi individu adalah elemen yang terartikulasi dalam nilai-nilai modernitas. Nilai-nilai otonomi ini mengarahkan manusia pada kemampuan individu untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*). Kebebasan dengan otonomi individu merupakan nilai etis abadi pada tatanan kelembagaan yang harus terus-menerus diperjuangkan.

### Kebebasan Sosial: Jalan Dialektis Honneth

Kebebasan negatif dan kebebasan reflektif telah meletakkan elemen dasar dalam gagasan kebebasan masyarakat modern, namun elemen dalam konsep yang lebih luas ditentukan oleh kebebasan sosial (*social freedom*). Honneth menegaskan bahwa konsep kebebasan sosial memiliki jawaban atas keterbatasan dalam gagasan kebebasan negatif dan kebebasan reflektif. Kebebasan sosial memiliki makna dan tujuan yang selaras dengan skema tujuan-tujuan sosial yang hanya tercapai dalam sebuah hubungan intersubjektif dengan orang lain, dalam sebuah institusi sosial dengan aturan-aturan normatif.<sup>38</sup>

Dengan menyertakan ruang lingkup institusi sosial, yakni ruang sosial eksternal yang menyertakan orang lain dalam relasi kebebasan. Konsep kebebasan yang dilihat Honneth dalam *Philosophy of Right* ialah, ketika kebebasan muncul dari ruang-ruang sosial di mana individu memiliki hubungan dengan subjek lain di dalamnya, sebagaimana pada pandangan Hegel bahwa relasi kebebasan adalah relasi di dalam ruang sosial di mana individu memiliki kesadaran diri untuk mengakui keberadaan yang lain, dan secara bebas membatasi dirinya sendiri dalam merealisasikan dirinya di ruang sosial eksternal.<sup>39</sup>

Dalam institusi sosial, individu tidak secara sepihak

<sup>38</sup> Zurn, 161.

<sup>39</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 43.

sedang berada di dalam diri kita sendiri, melainkan sengaja membatasi diri kita dengan menaruh hormat pada pihak lain, bahkan sementara kita tengah mengenali diri kita sebagai diri kita dalam pembatasan ini. Menyadari diri tidak sendiri dengan diri, tetapi secara bebas membatasi diri dalam hubungannya ke orang lain, bahkan ketika kita mengenal diri dalam keterbatasan kita. Dalam sikap sedemikian ini, manusia kiranya tidak merasakan dirinya ditentukan oleh pihak lain; justru sebaliknya ia memperoleh kesadaran-diri hanya dengan mengakui pihak lain sebagai yang lain.<sup>40</sup>

Hegel seakan mereduksi gagasan kebebasan menjadi persoalan perasaan semata, tetapi yang hendak disampaikan Hegel adalah sebuah gagasan kebebasan yang mendasar di mana berada bersama diri-sendiri di dalam diri-yang-lain (*being oneself in the other*).<sup>41</sup> Di sini subjek yang berada dalam institusi sosial dan membangun relasi yang resiprokal, masing-masing memahami dirinya sebagai bagian dari yang lain, 'kamu adalah aku, adalah kita.' Subjek dikatakan 'bebas' ketika ia berinteraksi dengan dan melalui institusi. Hanya dalam relasi ini subjek kemudian menyadari tujuan-tujuannya sendiri.

Kebebasan sosial menawarkan lingkungan sosial yang akomodatif terhadap setiap tindakan dengan dasar intuisi sosial. Honneth meletakkan syarat bahwa lembaga sosial tersebut adalah bagian dari realitas sosial di mana individu masih memiliki relasi privat dengan dirinya dan ia mendapatkan jaminan akan kebebasan reflektif.<sup>42</sup> Individu yang hendak memperjuangkan kebebasan, melihat tujuannya akan dapat tercapai dalam perjumpaannya dengan subjek lain. Perjumpaan dengan tujuan orang lain menjadi syarat bagi kita untuk merealisasikan tujuan kita. Keberadaan subjek lain adalah untuk melengkapi pengalaman subjektif kita dan menjadikan kita bagian dari upaya mencapai tujuan-tujuan orang lain.<sup>43</sup>

Tujuan-tujuan yang tadinya bersifat subjektif berubah menjadi obyektif. Tindakan yang tadinya bersifat reflektif kemudian meluas dan menyertakan yang lain dalam proses aktualisasi diri. Kebebasan yang semula bersifat reflektif menjadi kebebasan intersubjektif. Di sini tampak bahwa peran kebebasan sosial

<sup>40</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 44: "Here, we are not one-sidedly within ourselves, but willingly limit ourselves with reference to another, even while knowing ourselves in this limitation as ourselves. In this determinacy, the human being should not feel determined; on the contrary, he attains his self-awareness only by regarding the other as other."

<sup>41</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 44.

<sup>42</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 43.

<sup>43</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 15.

menjadi penting sebagai perwujudan dari perluasan dan keterkaitan akan hal-hal yang dalam menjamin kebebasan individu dalam masyarakat modern. Gagasan kebebasan memiliki relasi timbal balik antara individu dengan kerangka normatif masyarakat.

Individu menjadi bagian dari skema solidaritas sosial yang lebih luas di mana nilai motif dan niat unik individu terealisasi melalui peran sosial dan kewajiban sosial. Perjuangan individu terhadap yang lain, bukan hanya terbatas pada karena ingin melindungi dirinya, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari yang lain. Individu tidak hanya berada dalam perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dari luar sebagai afirmasi akan kebebasan negatif. Lebih dari itu, ruang lingkup realitas sosial adalah ruang lingkup yang bebas dari hegemoni dan keterpaksaan bagi individu membangun relasi resiprokal atau hubungan timbal balik dengan yang lain.

Kebebasan sosial terbagi dalam tiga kondisi. Kondisi *pertama*, seseorang menyadari tujuan pribadinya di dalam dan melalui institusi kebebasan sosial. Oleh Honneth, institusi ini disebut 'institusi relasional' di mana kewajiban dan peran individu terjalin satu sama lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan subjek melihat kebebasan orang lain sebagai kebebasan mereka sendiri. Melalui institusi ini, subjek secara timbal balik mendukung atau mempromosikan tujuannya karena orang lain tidak menentang niat seorang individu, melainkan mengafirmasi dan mempromosikannya.<sup>44</sup>

Kondisi *kedua*, lembaga relasional memungkinkan terjaganya peran timbal balik dalam memastikan terjadinya realisasi dan aktualisasi diri individu. Individu dapat bertindak bebas di dalam lembaga sosial tersebut.

Kondisi *ketiga*, individu yang bertindak dalam institusi relasional melengkapi dan memenuhi kebebasan orang lain dengan cara yang sama yakni mengafirmasi dan mempromosikan.<sup>45</sup> Analogi yang diberikan Honneth tentang perempuan yang otonom abad ke-21 dengan pilihan otentiknya untuk pemenuhan keinginan karir profesionalnya tidak dapat direalisasikan tanpa mengakomodasi dirinya dalam lembaga-lembaga relasional seperti lembaga peran gender, peluang pendidikan, struktur karier, dan pasar tenaga kerja, di mana tindakan orang lain memungkinkan atau mempromosikan bentuk realisasi dari keinginan yang didambakannya. Di sisi lain, kebebasannya juga mengharuskan ambisinya

menerima serapan sosial yang terakomodasi dalam lembaga-lembaga relasional subjektif, di mana hubungan intersubjektif yang saling mendukung terlaksana.<sup>46</sup>

Honneth menemukan bahwa keseluruhan gagasan Hegel dalam *Philosophy of Right* merupakan rekonsiliasi antara realitas sosial dan moralitas. Dengan basis rekonsiliasi ini, ia menginterpretasikan kembali dua kategori Hegel yakni Roh Objektif (*der objektive Geist*) dan *Sittlichkeit* sebagai dua unsur penting dalam bangunan prinsip kebebasan sosial yang diajukan Honneth. Ia memaknai kembali Roh Objektif sebagai rasionalitas yang ada dalam realitas sosial itu sendiri. Realitas sosial memiliki struktur rasional dan semua lembaga yang ada juga memiliki rasionalitas karena menghasilkan nilai-nilai itu bagi diri mereka sendiri dan bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>47</sup>

Sementara *Sittlichkeit* adalah sebuah institusi sosial-moral yang memiliki sistem nilai-nilai yang dianut oleh anggota masyarakat yang berada di dalamnya. Ketika nilai-nilai dalam sistem sosial tersebut dirusak maka muncul patologi sosial, dan konflik pun tak terhindarkan. Akibatnya, anggota masyarakat yang hidup di dalamnya mengalami penderitaan. Dengan demikian, kebebasan menjadi cita-cita yang utopis. *Sittlichkeit* merupakan produk dari prosedur yang dilembagakan secara sosial dan politik, serta memperoleh otoritas berdasarkan persetujuan kolektif. Subjek-subjek yang bertemu dalam *Sittlichkeit* telah memiliki pemahaman bersama dalam melembagakan nilai moral etis, aturan-aturan hukum dan kebijakan politik.<sup>48</sup> Relasi pengakuan intersubjektif yang terjadi dalam ruang-ruang insituti dalam sebuah masyarakat modern ini dibangun menjadi tatanan moral bersama. Prinsip ini kemudian menjadi nilai etis yang hanya bisa dimaknai jika nilai tersebut disepakati dan dijalani bersama. Dengan demikian tampak semakin jelas bahwa kebebasan sosial bergerak dalam ruang-ruang tatanan moral yang disetujui dan dijalani bersama-sama.

Ada dua peran penting yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga yang merealisasikan hubungan pengakuan timbal balik. Pertama, institusi sosial membangun dasar aturan dan simbol-simbol yang mengikat secara intersubjektif. Lembaga-lembaga sosial tersebut dipastikan memiliki peran sebagai

44 Zurn, 162; kutipan asli berasal dari: Honneth, Freedom's Right, 60.

45 Zurn, 162.

46 Zurn, 163.

47 Okochi, Taiju (2012). Freedom and Institution: Theory of Justice as Hegelian "Sittlichkeitslehre" in a Honneth's Das Recth der Freiheit, Hitotsubashi Journal of Social Studies 44 (Hitotsubashi University), h. 9-19.

48 Chotas & Matejckova (Ed), An Ethical Modernity? Hegel's Concept of Ethical Life Today, 7.

media transmisi ekspresi dan perilaku yang dapat dipahami sebagai undangan untuk merealisasikan tujuan bersama dan saling melengkapi. Individu menempatkan dirinya sebagai anggota dari kelompok masyarakat dan merealisasi tujuan dan niat secara timbal balik.

Kedua, institusi yang sama harus mampu membangun pemahaman intersubjektif akan kebebasan mereka, dengan prinsip 'berkembang menjadi' (*growing into*) individu yang bebas. Dengan demikian ia akan mewujudkan tujuan yang sama yakni mencapai kebebasan dalam prinsip saling melengkapi. Subjek belajar untuk memandang orang lain sebagai anggota masyarakat yang menjamin kebebasan.<sup>49</sup>

Relasi timbal balik yang ideal adalah relasi yang mendapatkan jaminan utuh baik dari jaminan psikologis, hukum, dan sosial. Institusi ini memiliki norma-norma perilaku yang dihormati bersama secara objektif. Norma-norma ini juga terintegrasi pada tujuan-tujuan individu. Kesadaran diri merupakan langkah penting dalam perluasan kebebasan. Pada awalnya kesadaran ini terbatas pada konteks kebebasan subjektif lalu berkembang menjadi kebebasan sosial. Honneth memberikan penekanannya demikian: "Oleh karena ikhtiar individu akan kebebasan akan baru terpenuhi hanya di dalam – atau melalui bantuan – institusi-institusi, maka paham intersubjektif mengenai kebebasan sekali lagi berkembang menjadi paham "sosial" tentang kebebasan."<sup>50</sup>

Kebebasan sosial bergerak dalam ruang-ruang pengakuan yang diusulkan Honneth terbagi dalam tiga tipologi yakni, cinta (*love*), hukum (*law*), dan solidaritas (*solidarity*). Pengakuan cinta merupakan langkah primer terbangunnya penyatuan etis dalam masyarakat modern. Relasi intersubjektif membutuhkan relasi yang berbasis emosi. Dengan cinta, seseorang dapat merealisasikan kebebasan reflektifnya. Cinta merupakan pra-kondisi sosial yang membangun keterhubungan antarsubjek.<sup>51</sup>

Adapun hukum menguatkan basis pengakuan. Hukum membangun kepercayaan dan penghargaan sosial yang lebih luas antar individu yang berada dalam relasi sosial tersebut. Sikap hormat yang muncul menjadi jaminan bahwa masing-masing individu saling mengakui dan menjamin upaya realisasi diri dan mencapai tujuannya. Akhirnya, soli-

daritas menumbuhkan semangat penghargaan dan kepercayaan antar-individu dalam upaya mengaktualisasikan diri.

Institusi-institusi sosial tersebut di atas harus memiliki keinginan dan niat yang universal, yang kemudian menjadi landasan adanya kebebasan pada diri individu. Dengan demikian, melalui institusi pengakuan tersebut, subjek akan belajar menyelaraskan motif dan tujuan mereka berdasarkan prinsip-prinsip universal sebagai penentu kebebasan. Konsekuensi dari konstruksi ini adalah bahwa kedua belah pihak hanya mengejar tujuan atau niat yang 'universal'. Pengakuan timbal balik hanya dapat muncul jika tujuan kedua belah pihak dapat dipenuhi dan saling melengkapi.

Kebebasan sosial dapat dicapai ketika subjek yang hendak mencapai tujuannya belajar untuk merumuskan keinginan dan niatnya pada basis 'universal' di mana mereka membutuhkan orang lain untuk melengkapi upaya mencapai tujuannya. Bagaimana individu memainkan perannya dalam struktur-struktur sosial dan masuk dalam proses penentuan diri secara resiprokal? Mengutip Hegel, Honneth mengusulkan bahwa individu perlu membangun habitus. Individu terus-menerus membangun interaksi untuk mengenal orang lain, dan melihat dirinya dalam diri orang lain. Dengan membangun habitus individu juga dengan langsung memberikan pengakuan terhadap kehadiran individu yang lain dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>52</sup>

Dengan memberikan pengakuan, subjek dapat mengimplementasikan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan secara reflektif. Kebebasan sosial merupakan perjuangan pengakuan dalam masyarakat modern dan menjadi nilai terpenting dalam kehidupan masyarakat modern. Di akhir proses sosialisasi, yang akan terus tinggal adalah sebuah sistem yang sudah terbangun dari habitus-habitus yang sudah terinternalisasi dan memastikan bahwa individu akan terus mengembangkan dan melanjutkan perilaku-perilaku kesalingpengakuan sebagai norma yang selalu dihormati dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari. Honneth menulis,

"Ketika individu tumbuh bersama dengan institusi, tempat praksis-praksis kesalingan yang bersifat

<sup>49</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 49.

<sup>50</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 45, "Because the individual's striving for freedom can thus be fulfilled only within – or with the aid of – institutions, the intersubjective concept of freedom expands once again into a 'social' concept of freedom."

<sup>51</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 45.

<sup>52</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 48.

<sup>53</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 48: "When individuals grow up with institutions in which normative practices of reciprocity are permanently established, then in Hegel's view they will learn in the course of their 'upbringing' [bildung] to develop desires and goals that can only be satisfied through the complementary actions of others."

normatif itu tertata dengan mantap, maka dalam pandangan Hegel mereka akan belajar dalam proses 'pendidikannya' (Bildung) untuk mengembangkan keinginan dan tujuan mereka yang hanya bisa dipuaskan melalui tindakan-tindakan komplementer yang saling melengkapi satu dengan lainnya."<sup>53</sup>

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa individu hanya dapat mengalami dan mewujudkan kebebasan jika mereka berpartisipasi dalam institusi-institusi sosial yang ditandai dengan praktik pengakuan timbal balik. Ruang-ruang yang menjadi pusat kebebasan sosial adalah hubungan personal, pasar (ekonomi), dan demokrasi. Tiga bentuk hubungan personal yakni persahabatan, relasi romanti, dan keluarga berkontribusi pada ruang privat. Melalui ruang ini, dua individu atau lebih mendapatkan peluang untuk menyempurnakan dirinya dalam relasi privatnya dengan yang lain. Melalui hubungan pribadi, subjek mencapai kebebasan sepenuhnya dalam memahami diri sendiri melalui konfirmasi dari pihak lain yang dekat dengan diri subjek.<sup>54</sup> Relasi emosi menjadi relasi utama antar subjek dalam hubungan timbal balik.

Kebebasan sosial adalah konsep alternatif Honneth yang menekankan tindakan manusia mendapatkan nilai dan tujuannya ketika ia berada dalam skema kerja sama kegiatan sosial. Seseorang disebut bebas ketika mereka bisa berada 'di rumah' di dalam dunia sosial mereka. Masing-masing individu menyadari motif unik dan intensi dalam mengakomodasi peran dan obligasi sosialnya.

### Keadilan sebagai *Telos* Kebebasan Sosial

Konsep kebebasan sosial yang diusulkan Honneth memberikan pandangan alternatif untuk memahami teori keadilan, selain dari pandangan yang sudah dikembangkan oleh Rawls yang berbasis pada gagasan Kant, yang dinilai abstrak. Melalui *Freedom's Right*, Honneth menghidupkan kembali filsafat praktis Hegel tanpa bergantung pada klaim metafisika-ontologis yang mendasarinya.<sup>55</sup>

Dalam *Freedom's Right*, Honneth menulis,

<sup>54</sup> Zurn, 172.

<sup>55</sup> Loughlin Gleeson, *Freedom's Right: Review of 'Freedom's Right' by Axel Honneth*, UNSW Sydney, 2015. Downloaded at: <https://www.researchgate.net/publication/305017106>

<sup>56</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 17: "In modernity, the demand for justice can only be shown to be legitimate by making some kind of reference to the autonomy of the individual; it is neither the will of the community nor the natural order, but individual freedom that forms the normative foundation of all conceptions of justice."

"Dalam modernitas tuntutan akan keadilan hanya bisa ditunjukkan dengan merujuk pada otonomi individu: bukan pada kehendak komunitas atau ketentuan alamiah, melainkan pada kebebasan individu membentuk fondasi normatif dari konsep-konsep keadilan."<sup>56</sup>

Dalam pandangan Honneth, keadilan berarti memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmati kebebasannya. Sehingga, hanya dengan memahami apa itu kebebasan, maka semakin terang bagi kita untuk memahami arti kebebasan. Sebaliknya, jika kita gagal memahami apa arti kebebasan yang sesungguhnya, maka, makna keadilan akan selalu berada di sisi yang gelap. Keterikatan antara keadilan dan kebebasan individu melampaui fakta sejarah. Penyatuan kedua konsep tersebut merupakan proses yang terjadi berabad-abad, yang dengannya gagasan klasik hukum telah dipisahkan dari kerangka pemikiran teleologis, untuk menyatakan bahwa subjek berhak atas dirinya dalam menentukan dirinya dan menuliskan hukum-hukum serta norma-norma sosial.

Konsep keadilan mulai tampak dalam pandangan Hobbes lewat teori kontrak sosialnya, di mana keadilan berdasarkan hasil konsensus anggota-anggotanya. Meski tampak ada kesepakatan tentang apa itu keadilan, namun, tatanan sosial tidak memiliki keutuhan akan keadilan yang bisa diperoleh seluruh anggotanya. Dalam kontrak sosial, keadilan bersifat parsial dan hanya melindungi kepentingan pribadi sebagian anggota kelompok yang menyatakan kesepakatannya.

Di sisi lain, teori prosedural Kantian dalam kebebasan individu meletakkan subjektivitas sendiri dianggap sebagai 'bebas', meskipun tidak melibatkan realitas eksternalnya. Ketika mendefinisikan keadilan, Kant tampaknya cukup puas dengan melihat prosedur reflektif untuk memperoleh pandangan tentang apa yang adil. Namun pandangan ini juga tidak memperhitungkan realitas institusional masyarakat. Tampak bahwa keadilan masih bersifat parsial, karena ada kesenjangan sosial antar individu yang tidak terakomodasi dalam lembaga-lembaga kebebasan sosial dalam pertimbangan konsep keadilan.

## Kesimpulan

Bagi Honneth, yang 'adil' berarti melindungi, menumbuhsuburkan, atau merealisasikan otonomi semua anggota masyarakat. Sayangnya masih ada pertanyaan besar yakni kita masih belum dapat menentukan tatanan sosial seperti apa yang disebut sebagai tatanan sosial yang 'adil'. Sementara itu, proses penentuan syarat keadilan bergantung pada seberapa jauh kita mendefinisikan nilai kebebasan individu sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana kita bisa menjamin kebebasan individu itu? Hasrat akan keadilan adalah ekspresi kapasitas subjektif kita terhadap kebenaran. Lebih lanjut memahami perspektif keadilan dilakukan dengan cara manusia mempertanyakan tatanan sosial serta legitimasi moralnya dengan menjadi bagian dari upaya menentukan aturan-aturan normatif dalam kehidupan sosial.<sup>57</sup>

Dalam pandangan Honneth, gagasan keadilan terkondisikan dalam beragam aspek dalam institusi-institusi yang menjanjikan kebebasan. Kebebasan individu ini menjadi salah satu nilai sentral yang menurut Honneth memiliki peran besar untuk memastikan bahwa gagasan keadilan sosial dan upaya mencapai keadilan diatur sedemikian rupa agar memenuhi kepentingan individu. Meski ada nilai etis lain yang memainkan peran dalam mencapai keadilan sosial, menurut Honneth, otonomi individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam diskursus keadilan sosial. Dengan adanya kebebasan yang dimiliki subjek, maka ada bentuk dukungan etis akan otonomi individu tersebut sehingga tidak berpotensi merusak individu dan jaringan sosial yang di dalamnya. Dalam modernitas, tuntutan akan keadilan hanya dapat dikatakan otentik (valid) jika ada rujukan terhadap otonomi individu, bukan soal kehendak komunitas, tidak juga terkait dengan tatanan alamiah, melainkan kebebasan individu yang menjadi fondasi normatif dari semua konsep tentang keadilan.<sup>58</sup>

Konsep keadilan menjadi sistem sosial yang melaluinya masing-masing subjek dapat mencapai realisasi diri tanpa menyakiti yang lain. Hal ini juga dilihat sebagai sebuah sistem hak-hak individu yang berkontribusi dalam memberikan bentuk prosedur kolektif dalam penentuan diri. Apa yang dilihat sebagai 'adil' adalah apapun yang dapat mempromosikan perilaku sosial yakni solidaritas, yang merupakan prasyarat utama yang diperlukan untuk kegiatan bersama di ruang publik.

Syarat agar tatanan sosial modern menjadi 'adil' adalah ketika individu menjadi bagian dalam lembaga-lembaga sosial yang mengutamakan keadilan. Suatu lembaga sosial disebut institusi yang adil karena menyertakan relasi intersubjektif di dalamnya. Dan bukan hanya institusi yang menawarkan kontrak sosial semata atau menggunakan sikap reflektif sebagai referensi makna bebas pada individu. Untuk menjadi bagian dari tatanan sosial maka yang perlu dipastikan bahwa subjek telah terintegrasi dalam struktur sosial. Dengan kebebasan ini individu kemudian berpartisipasi dalam memantau legitimasi tatanan sosial.<sup>59</sup> Bagi Honneth, hal yang disebut 'adil' tak hanya diukur dari sejauh mana individu menikmati kebebasan negatif atau reflektif. Pengakuan dipahami dalam konteks keadilan dan keadilan harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan sosial.

Keadilan lahir dari tindakan nyata kita dalam memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam lembaga-lembaga pengakuan. Lembaga-lembaga tersebut secara normatif merupakan lembaga yang substantif dan memiliki peran penting dalam membangun relasi intersubjektif.<sup>60</sup> Dengan demikian dalam institusi tersebut akan terbangun relasi yang disebut 'etis' yang membutuhkan sistem keamanan hukum, adanya otoritas negara, dan dukungan sipil untuk menuju cita-cita keadilan sosial.

<sup>57</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 17-18.

<sup>58</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 17-19.

<sup>59</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 57.

<sup>60</sup> Honneth, *Freedom's Right*, 61.

## Daftar Pustaka

### Sumber Buku

#### Utama

Honneth, Axel (1995). *Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. terj. Joel Anderson. The MIT Press Cambridge, Massachusetts: Polity Press.

\_\_\_\_\_, (2014). *Freedom's Right: The Social Foundation of Democratic Life*. Transl. Joseph Ganahl. New York: Columbia University Press,

#### Sekunder

Berlin, Isaiah (2013). *The Power of Ideas (second edition)*. New Jersey: Princeton University Press.

\_\_\_\_\_, (2022). *Liberty*. ed. Henry Hardy. New York: Oxford University Press.

Best, Beverly & Bonefelf, Werner (2018). *The Sage Handbook of Frankfurt School Critical Theory Vol. 1*. ed. O'Kane, Chris. London: Sage Reference.

Bottomore, Tom. (1989). *The Frankfurt School and its Critics*. London: Routledge.

Brink, Bert van den & Owen. David, ed. (2007). *Recognition and Power: Axel Honneth and the Traditional of Critical Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Deranty, Jean-Philippe (2009). *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth Social Philosophy*. Leiden: Brill.

Fraser, Nancy. Honneth, Axel (2003). *Redistribution or Recognition: A Political - Philosophical Exchange*, New York: Verso.

Guyer, Paul (2006). *Kant*. New York: Routledge.

Hardiman, Francisco Budi (1990). *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.

Hegel, G.W.F. (2008). *Outline of the Philosophy of Right*. transl. T.M. Knox, rev.ed.&intro. Stephen Houlgate, New York: Oxford University Press.

Herry-Priyono, B. (2020). *Makalah Politik dan Filsafat Politik*. Jakarta: Driyarkara.

\_\_\_\_\_, (2022). *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Honneth, Axel (2009). *Pathologies of Reason: On the Legacy of Critical Theory*, transl. James Ingram and others. New York: Columbia University Press.

\_\_\_\_\_, (2012). *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*. Transl. Joseph Ganahl. Cambridge, UK: Polity Press.

Kain, Philip J. (2018). *Hegel and Right: The Study of the Philosophy of Right*. Albany, New York: State University of New York Press.

Petherbridge, Daniel (2013). *The Critical Theory of Axel Honneth*. Maryland: Lexington Books.

Schmitz, Volker, et al. (2019). *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition*, Bloomington: Palgrave Macmillan.

Sihotang, Kasdin (2018). *Filsafat Manusia: Jendela Menyingkap Humanisme (edisi revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sindhunata (2019). *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kiritis Sekolah Frakfurt, Max Horkheimer & Theodor W. Adorno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Snijders, Adelbert (2004). *Antropologi Filsafat: Manusia, Paradoks dan Serun*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Tam, Henry (2019). *The Evolution of Communitarian Ideas: History, Theory, and Practice*. Cambridge: Palgrave Macmillan.

Tjahjadi, S.P. Lili (1991). *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Wolff, Jonathan (1991). *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Oxford University Press,

Zurn, Christopher F. (2015). *Axel Honneth*. Cambridge: Polity Press.

\_\_\_\_\_. (2015). *Axel Honneth - Key to Contemporary Thinkers*. Cambridge: Polity Press.

## Sumber Digital

### Buku/ Jurnal

------. *The Diseases of Society: Approaching a Nearly Impossible Concept*, (The Johns Hopkins University Press: Journal Article Social Research Vol. 81 No 3, German Perspectives on the Social Sciences. 2014. <http://www.jstor.org/>

------. *Recognition and Justice: Outline of a Plural Theory of Justice*. *Acta Sociologica* 2004 47:351, Sage.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0001699304048668>

------. Farrell, John. *Recognition and Moral Obligation*. *Social Research*, Vol. 64. No. 1, The Decent Society (SPRING 1997). h. 16-35, The New School.

<https://www.jstor.org/stable/40971157>

Chotas & Matejkova (Ed). *An Ethical Modernity? Hegel's Concept of Ethical Life Today*.

Haacke, Jurgen ((Jan. 2005). *The Frankfurt School and International Relations: On the Centrality of Recognition*. *Review of International Studies*, Vo.31. No.1.

<https://www.cambridge.org/core/journals/>

Loughlin Gleeson (2015). *Freedoms Right: Review of 'Freedom's Right' by Axel Honneth*, UNSW Sydney. didownload dari: <https://www.researchgate.net/publication/305017106>

Okochi, Taiju (2012). *Freedom and Institution: Theory of Justice as Hegelian "Sittlichkeitslehre" in a Honneth's Das Recth der Freiheit*, *Hitotsubashi Journal of Social Studies* 44. *Hitotsubashi University*.

<https://www.jstor.org/stable/43294600>